



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2025

1. Latar Belakang

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah adalah Pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dalam pelaksanaannya sector perpajakan diatur melalui sistem beserta undang undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pembangunan daerah melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaan untuk kepentingan bersama, peran penting dari masyarakat membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sector pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak pajak yang dibayarkan ke Kas Daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersediannya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat agar adil dan makmur.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah adalah tersedianya barang kuasi untuk Retribusi Daerah serta sistem pengelolaan pendapatan berjalan baik

Tujuan Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini adalah tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak daerah, Penyediaan cetak barang kuasi untuk Retribusi Daerah secara tersistem dan terstruktur baik dalam pencatatan maupun realisasi

3. Target dan Sasaran

- Target yang diharapkan pada subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini adalah tercapainya target Pendapatan Daerah
- Sasaran dari subkegiatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini adalah perangkat Daerah sebagai pengampu Pendapatan Asli Daerah.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. KPA : Roza Afrila, ST, M.Si

5. Keluaran yang diinginkan

Keluaran yang diinginkan pada subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini adalah Tercetaknya barang kuasi dan sistem yang transparansi

Jumlah Anggaran pada sub subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini adalah Rp.210.000,050,- (Dua ratus sepuluh juta lima puluh rupiah)

6. Ruang Lingkup Pengadaan/ Lokasi Kegiatan :

Ruang lingkup pekerjaan adalah merupakan

- Cetak barang Kuasi
- Proporasi barang Kuasi
- Pendistribusian ke perangkat Daerah
- Pengembangan Sistem Pendapatan Asli Daerah(SIMPADEH)
- Pengembangan SISMIOP

Lokasi Kegiatan : Berlokasi di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

Waktu dan Jadwal Pelaksanaan subkegiatan

- a. Waktu pelaksanaan subkegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 8.00
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.00

8.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Desember 2024

Diketahui oleh :

Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



Intan Novia Fatma ,SE,Ak,MPP,MAP
Pembina (IV/a)
Nip.19841111 200902 2 008

Kuasa Pengguna Anggaran
Sub Kegiatan Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Pajak Daerah



Roza Afrila,ST.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197604212006042004

JADWAL SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPADAH)

NO	URAIAN KEGIATAN	Waktu Pelaksanaan																																																																			
		2024				2025																																																															
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
1	Pekerjaan Persiapan																																																																				
2	Penambahan Jenis Lahan Produksi &Ternak																																																																				
3	Penambahan Tarif Lahan Pertanian																																																																				
4	Perubahan Tarif berdasarkan UU HKPD																																																																				
5	Perubahan hitungan denda																																																																				
6	Penambahan penerapan persen NJKP																																																																				
7	Perubahan Modul Pembayaran																																																																				
8	Perubahan Modul Cetak SPPT Massal Single dan Double																																																																				
9	Perubahan Modul Cetak SPPT Terseleksi Single dan Double																																																																				
10	Perubahan Modul Penetapan Massal																																																																				
11	Perubahan Alur Proses user SISMIOP																																																																				
12	Penambahan Modul piutang di cetak SPPT																																																																				
13	Cetak Massal SPPT PBB Tahun 2025																																																																				
14	Penambahan Modul eSPPT PBB-P2 pada Website BPKPAD																																																																				
15	Penambahan Modul Pembayaran SPPT PBB - P2 pada Website																																																																				
16	Penambahan Modul Realisasi PBB - P2 Per Nagari																																																																				
17	Pengembangan Modul Opsen BBNKB																																																																				
18	Pengembangan Modul Opsen PKB																																																																				
19	Pengembangan Modul Opsen Mineral Bukan Logam																																																																				
20	Pengembangan Modul Pendataan Potensi Pajak Daerah dengan SIG																																																																				

[illegible]